

BAB 3

KIPRAH RASUNA SAID DALAM GERAKAN EMANSIPASI PEREMPUAN MELALUI PERMI (PERSATUAN MUSLIMIN INDONESIA) 1930-1937

3.1 PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) Sebagai Organisasi Perjuangan Hak Perempuan Tahun 1930-1937

PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) merupakan organisasi pergerakan yang muncul pada masa Kolonial Belanda dan berkembang dalam konteks kebangkitan kesadaran politik umat Islam di Sumatra Barat. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tahun 1930 sebagai transformasi dari gerakan pendidikan dan pemikiran Islam modern yang sebelumnya telah hadir di lingkungan Sumatra Thawalib. Dalam perkembangannya, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) tidak hanya menempatkan isu kemerdekaan nasional sebagai agenda utama, tetapi juga memberi perhatian yang kompleks terhadap persoalan sosial kemasyarakatan termasuk kedudukan dan peran perempuan.⁸²

Pada awal abad ke-20, perempuan masih menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam kehidupan sosial dan politik. Sistem Kolonial yang berpadu dengan budaya patriarki menyebabkan perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah rumah tangga dan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam situasi tersebut, kehadiran PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) membawa pembaruan penting karena organisasi ini memandang perempuan sebagai bagian dari umat dan bangsa yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam perjuangan melawan penindasan Kolonial.⁸³

PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) memberikan ruang partisipasi yang cenderung luas bagi perempuan dibandingkan dengan organisasi Islam politik lain pada masa yang sama. Perempuan tidak hanya berperan sebagai anggota, melainkan turut dilibatkan dalam kegiatan organisasi seperti rapat, diskusi ideologis, serta kegiatan penyadaran politik di dalam masyarakat.⁸⁴ Keterlibatan ini mencerminkan

⁸² Burhanudin Daya, *op. cit.*, hlm.52.

⁸³ *Ibid*, hlm.54.

⁸⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.37.

adanya pandangan progresif di dalam organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) bahwa perjuangan tidak dapat dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, melainkan harus didasarkan pada kesadaran bersama sebagai bangsa yang sama tertindas.

Upaya PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dalam memperjuangkan hak perempuan terlihat jelas melalui fokusnya pada aspek pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perempuan agar mampu berpikir kritis dan memiliki kesadaran sosial politik. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) mendorong perempuan untuk memperoleh pendidikan agama dan pengetahuan umum secara seimbang.⁸⁵ Melalui pendidikan tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya pandai dalam peran domestik saja, tetapi juga memiliki kemampuan berargumentasi, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan perjuangan nasional.

Peran perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) semakin nyata dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat. Salah satu tokoh yang menonjol adalah Rasuna Said, yang dikenal sebagai orator dan aktivis perempuan yang berani menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah Kolonial. Melalui aktivitasnya di PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan keberanian politik yang setara dengan laki-laki.⁸⁶

Dalam landasan ideologinya, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) mengaitkan perjuangan hak perempuan dengan pemahaman Islam yang berintegrasi dan kontekstual. Organisasi ini menolak sifat keagamaan yang membatasi peran perempuan secara sempit. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) menegaskan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, sehingga perempuan memiliki hak moral dan religius untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik.⁸⁷ Pendekatan ini menjadi penting karena

⁸⁵ Mardjani Martamin, *op. cit*, hlm.79.

⁸⁶ Purwanto Putra, *op. cit*, hlm. 102.

⁸⁷ *Sinar Sumatra*, 18 Mei, 1933.

mampu menjawab persoalan kritik yang sering mempersoalkan keterlibatan perempuan dalam ranah publik.

Perjuangan perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) tidak dapat dipisahkan dari konteks perlawanan terhadap kolonialisme. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) memandang ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai bagian dari sistem penindasan Kolonial yang lebih luas. Dengan terjadinya hal tersebut, pembebasan perempuan dipahami sebagai bagian dari proses pembebasan bangsa secara keseluruhan. Pandangan ini tercermin dalam berbagai pidato dan tulisan kader PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang menekankan pentingnya persamaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan.⁸⁸

Aktivitas PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang semakin meluas, termasuk keterlibatan aktif perempuan di dalamnya, menimbulkan kekhawatiran pemerintah Kolonial Belanda. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dianggap sebagai organisasi radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan Kolonial. Dengan terjadinya hal tersebut, organisasi ini berada di bawah pengawasan ketat, dan sejumlah tokohnya mengalami tekanan, serta pembatasan aktivitas politik.⁸⁹ Reaksi keras pemerintah Kolonial tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) bukanlah hal yang bersifat pribadi, melainkan memiliki dampak nyata dalam menggerakkan kesadaran masyarakat.

Meskipun PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Kolonial, pengaruh dan gagasan yang diperjuangkannya tidak serta-merta hilang. Nilai-nilai mengenai pentingnya pendidikan, kesadaran politik, dan keterlibatan perempuan dalam perjuangan terus hidup dan diwariskan melalui kader-kadernya. Perempuan yang pernah aktif di PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) kemudian melanjutkan perannya dalam berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, maupun pergerakan nasional.⁹⁰

⁸⁸ Muhammad Sabarudin, *op. cit*, hlm.29.

⁸⁹ Effendi, *op. cit*, hlm.63.

⁹⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.152.

PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) memiliki peran signifikan sebagai organisasi perjuangan hak perempuan pada masa pergerakan nasional. Melalui keterbukaan terhadap partisipasi perempuan, penekanan pada pendidikan, serta ideologis berbasis Islam, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) berhasil mendorong perempuan untuk tampil sebagai subjek perjuangan. Peran organisasi ini menunjukkan bahwa perjuangan hak perempuan di Indonesia telah berkembang seiring dengan perjuangan kemerdekaan dan menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional.

Hal ini sejalan dengan teori feminisme radikal yang memandang bahwa penindasan terhadap perempuan dipahami bukan sekadar sebagai diskriminasi individual, melainkan sebagai hasil dari adanya sistem patriarki yang mengakar dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya.⁹¹ Bagi Rasuna Said, sistem kolonialisme yang masuk dipicu dengan adat patriarki adalah akar masalah yang harus dicabut melalui pendidikan politik dan kesadaran massa di dalam organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia).

3.2 Latar Belakang Masuknya Rasuna Said Dalam Organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) 1930-1937

Menjelang tahun 1930 perempuan bumiputera masih menghadapi berbagai bentuk ketertinggalan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun politik. Ruang gerak perempuan sangat dibatasi oleh struktur masyarakat patriarki serta kebijakan Kolonial yang tidak memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kondisi ini mendorong munculnya kesadaran di kalangan perempuan terpendang untuk turut serta dalam gerakan sosial dan politik sebagai upaya memperbaiki nasib kehidupan perempuan.

Rasuna Said tumbuh di wilayah tradisi Minangkabau yang memiliki rasa intelektual dan keagamaan yang kuat. Latar belakang pendidikan agama dan pengalaman intelektual yang ia peroleh sejak muda membentuk pandangannya mengenai pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Rasuna Said melihat bahwa ajaran Islam pada dasarnya memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan, namun dalam praktik sosial sering kali terjadi kesalahpahaman

⁹¹ Rosemarie Putnam Tong, *op. cit*, hlm.72.

sehingga justru membatasi hak dan peran perempuan. Kesadaran ini yang kemudian mendorong Rasuna Said untuk terlibat aktif dalam organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga memiliki pergerakan di bidang politik dan nasionalisme.⁹²

Sebelum Rasuna Said mulai aktif di PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), ia bergabung dalam lingkungan diskusi keagamaan dan pergerakan di Sumatra Barat. Rasuna Said aktif mengikuti berbagai pertemuan dan pengajian yang tidak hanya membahas persoalan keagamaan, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial dan politik umat Islam di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Diskusi keagamaan yang diikuti oleh Rasuna Said sebelum keterlibatannya dalam organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) umumnya berlangsung dalam bentuk pengajian, ceramah, serta pertemuan intelektual yang diselenggarakan oleh kalangan ulama dan tokoh pergerakan Islam di Sumatra Barat. Diskusi tersebut tidak hanya membahas persoalan agama saja, tetapi juga mengaitkan ajaran Islam dengan persoalan sosial yang dihadapi umat seperti ketidakadilan Kolonial, kemiskinan, serta keterbelakangan pendidikan khususnya di kalangan perempuan.⁹³

Rasuna Said juga pernah mengikuti pendidikan di sekolah yang dipimpin oleh Haji Abdul Majid, meskipun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pengalaman pendidikan tersebut memberikan dasar awal bagi pembentukan wawasan dan kedisiplinannya. Selanjutnya, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di Sekolah Putri (*Meisjesschool*), sebuah lembaga pendidikan yang berfokus pada pembekalan keterampilan praktis bagi perempuan. Melalui pendidikan di sekolah tersebut, Rasuna Said memperoleh berbagai keahlian, antara lain dalam bidang memasak, menjahit, serta keterampilan lain yang berkaitan dengan pengelolaan urusan rumah tangga. Pendidikan ini turut membentuk kemampuan Rasuna Said dalam memahami peran perempuan pada masa itu, sekaligus menjadi bekal awal yang akan berpengaruh terhadap pandangannya mengenai pentingnya pendidikan dan kemandirian perempuan. Bakat dan kepandaian Rasuna Said mendukungnya untuk bergabung dalam pergerakan rakyat,

⁹² Jajat Burhanudin, *op. cit*, hlm.67.

⁹³ Hasnawati, *op. cit*, hlm.97.

Rasuna Said yang mempunyai sifat ikhlas dan jujur, karena itu beliau terpilih sebagai pemimpin pergerakan rakyat.⁹⁴ Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan kharismatik yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik merujuk pada kualitas luar biasa yang dimiliki seseorang, di mana otoritas yang diperolehnya bukan berasal dari tradisi maupun aturan formal, melainkan dari pengakuan pengikut atas kemampuan, kualitas, dan daya tarik pribadi seorang pemimpin.⁹⁵

Pada tahun 1926, bencana alam gempa bumi dan letusan gunung merapi yang melanda Padang Panjang menyebabkan Rasuna Said harus kembali ke kampung halamannya di Maninjau. Setelah kembali ke daerah asalnya, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah yang dipimpin oleh H. Abdul Majid yang berasal dari golongan kaum tua. Namun dalam proses pendidikannya tersebut Rasuna Said merasa tidak menemukan kesesuaian dengan sistem pembelajaran dan pemikiran yang berkembang di lingkungan sekolah tersebut. Kondisi ini mendorong Rasuna Said untuk kemudian bergabung dengan sekolah Thawalib, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh kelompok yang dikenal sebagai kaum muda. Di sekolah Thawalib inilah karakter, sikap, dan kepribadian Rasuna Said mulai terbentuk secara lebih kuat sebagai calon pejuang perempuan.⁹⁶ Melalui pendidikan yang diterimanya, Rasuna Said dibina untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan gagasan, termasuk keterampilan berpidato yang menjadikannya seorang orator ulung dalam menyuarakan aspirasi dan pandangannya di hadapan masyarakat.

Pada tahun 1926 Rasuna Said bergabung dalam organisasi *Sarekat Ra'jat* sebagai pengajar serta sekretaris dalam masa menjabatnya. Organisasi *Sarekat Ra'jat* pada awalnya berupaya menghimpun kekuatan masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Namun dalam perkembangannya, Datuk Ibrahim yang saat itu aktif sebagai propagandis komunis di wilayah Payakumbuh memanfaatkan organisasi ini sebagai sarana untuk

⁹⁴ Jajat Burhanudin, *op. cit*, hlm.60.

⁹⁵ Max Weber, *op. cit*, hlm.241-242.

⁹⁶ Kamajaya, *op. cit*, hlm.97.

kepentingan politik. Situasi tersebut kemudian memicu terjadinya pemberontakan komunis pada tahun 1927 yang meletus di Silungkang. Peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban, terutama dari kalangan rakyat kecil. Sebagai dampak dari kondisi tersebut, pada tahun 1930 *Sarekat Ra'jat* secara resmi mengalami perubahan menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia.⁹⁷

Pada waktu yang bersamaan, Perhimpunan Sumatra Thawalib melalui konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 22–27 Mei 1930 menyatakan pendirian sebuah partai politik yang diberi nama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) secara resmi berstatus sebagai partai Islam politik, sementara Partai Sarikat Islam Indonesia juga merupakan organisasi politik. Dalam konteks ini, Rasuna Said tercatat sebagai anggota kedua partai tersebut, sehingga posisinya bertentangan dengan ketentuan disiplin organisasi Partai Sarikat Islam Indonesia yang ditetapkan dalam kongres tahun 1921, yang menyatakan bahwa setiap anggota dilarang merangkap keanggotaan dalam lebih dari satu partai politik.⁹⁸ Kondisi tersebut membuat Rasuna Said memilih untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan menetapkan sikap politiknya. Ia kemudian mengundurkan diri dari organisasi Partai Sarikat Islam Indonesia dan memantapkan pilihannya untuk bergabung serta aktif dalam organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia).

3.3 Kiprah Rasuna Said Dalam Gerakan Emansipasi Perempuan Melalui Organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) 1930-1937

Rasuna Said dikenal aktif terlibat dalam sejumlah organisasi pergerakan, baik yang bergerak di bidang politik maupun sosial keagamaan. Rasuna Said dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki wawasan yang luas terhadap dunia politik. Keterlibatannya menunjukkan adanya keberlanjutan tradisi perjuangan perempuan Indonesia yang telah dirintis sejak abad ke-19. Bakat intelektual dan kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya telah terlihat sejak masa sekolah, sehingga mendorong Rasuna Said untuk lebih peka terhadap persoalan sosial dan politik yang

⁹⁷ Jajang Jahroni, *op. cit*, hlm.76-77.

⁹⁸ Deliar Noer, *op. cit*, hlm.30.

berkembang di sekitarnya.⁹⁹ Lingkungan sosial serta dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu turut membentuk kesadarannya akan pentingnya peran individu khususnya perempuan dalam memperjuangkan perubahan.

Kesadaran politik yang dimilikinya mendorong Rasuna Said untuk terjun secara langsung ke dalam organisasi politik sebagai sarana memperjuangkan gagasan dan pandangannya. Pada tahun 1930, ia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), sebuah organisasi Islam politik yang lahir dari kalangan Sumatra Thawalib. Organisasi ini didirikan oleh para murid dan tokoh intelektual yang tergabung dengan sekolah Thawalib, yang pada masa itu dikenal sebagai pusat pembaruan pemikiran Islam sekaligus tempat berkembangnya kesadaran politik di Sumatra Barat.¹⁰⁰ Pilihan Rasuna Said untuk masuk ke dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) bukanlah keputusan yang bersifat spontan, melainkan didasarkan pada kesesuaian ideologi dan arah perjuangan organisasi tersebut. PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dikenal sebagai organisasi yang memadukan nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme serta menentang praktik penjajahan Belanda melalui jalur politik dan pendidikan.¹⁰¹

Keikutsertaan Rasuna Said dalam organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) menunjukkan kecenderungannya terhadap organisasi yang tidak hanya berlandaskan ajaran Islam, tetapi juga memiliki orientasi nasionalisme yang kuat. Melalui keterlibatannya dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said menemukan ruang yang lebih luas untuk menyalurkan gagasan-gagasan politiknya. Organisasi ini tidak hanya menjadi sarana perjuangan melawan kolonialisme, tetapi juga menjadi tempat pembentukan kader-kader politik yang memiliki kesadaran nasional dan religius.¹⁰² Bergabungnya Rasuna Said ke dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) menandai fase penting dalam perjalanan

⁹⁹ Astuti Widi, *Perempuan Pejuang Jejak Perjuangan Perempuan Islam Nusantara dari Masa ke Masa*. (Bandung: Konstanta Publishing House, 2013), hlm.49.

¹⁰⁰ Burhanudin Daya, *op. cit*, hlm.50.

¹⁰¹ Astuti Widi, *op. cit*, hlm.66.

¹⁰² White Sally, *Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence Movement*. (Singapore:NUS Press, 2013), hlm.29.

politiknya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam pergerakan nasional pada masa Kolonial.

Pada tahun 1929 organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang dibentuk oleh para pelajar Sumatra Thawalib tidak lagi membatasi keanggotaan hanya pada pelajar aktif di lingkungan sekolah, melainkan mulai membuka diri bagi para alumni serta guru-guru sekolah Thawalib yang telah menyelesaikan atau tidak lagi menjalankan aktivitas pendidikan secara langsung di lembaga tersebut. Perluasan keanggotaan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi organisasi, dari semula berfokus pada pendidikan ke arah peran yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.¹⁰³

Pada tahun 1930 organisasi ini secara resmi mengubah nama menjadi Persatuan Muslimin Indonesia. Perubahan nama tersebut mencerminkan tujuan organisasi yang semakin menekankan perjuangan sosial, keagamaan, dan politik dalam konteks perlawanan terhadap kebijakan Kolonial. Sejak saat itu, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) berkembang sebagai organisasi yang berupaya menghimpun umat Islam dalam wadah perjuangan yang lebih terorganisir, sekaligus menjadi sarana untuk gagasan kebangsaan dan keadilan sosial.¹⁰⁴

Begitu aktif dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), langkah pertama yang dilakukan Rasuna Said adalah memperkuat basis pendidikan perempuan. Ia memahami bahwa emansipasi perempuan tidak bisa dicapai jika kaum perempuan sendiri masih terbelenggu oleh kebodohan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, Rasuna Said aktif mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dan memimpin sekolah kursus putri di Bukittinggi.

Tidak hanya mengajar, Rasuna Said juga berkontribusi dalam menciptakan ruang-ruang pembelajaran baru. Selama bergabung dengan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said yang memiliki pengalaman mengajar turut aktif menjadi guru di sekolah-sekolah yang didirikan Sumatra thawalib, misalnya sekolah thawalib putri dan kursus putri di Bukittinggi. Selain mengajar, Rasuna Said juga turut serta terlibat dalam berdirinya sekolah menyekal yang merupakan

¹⁰³ Burhanudin Daya, *op. cit*, hlm.68.

¹⁰⁴ *Medan Ra'jat*, 15 Maret 1931, No. 4, hlm.28.

kursus pemberantasan buta huruf dan sekolah thawalib rendah yang berada di Padang.¹⁰⁵

Keberadaan Sekolah Menyesal ini memiliki nilai strategis yang besar dalam konteks emansipasi. Buta huruf adalah salah satu belenggu utama yang membuat perempuan tidak bisa mengakses informasi, tidak bisa membaca tulisan-tulisan perjuangan, dan tidak bisa berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik. Dengan memberantas buta huruf melalui kursus khusus, Rasuna Said membangun fondasi terbawah dari kurangnya emansipasi perempuan.¹⁰⁶ Rasuna Said menginginkan para pelajarnya perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan pelajaran agama dan pelatihan politik. Inilah yang membedakan pendekatan Rasuna Said dari para pendidik perempuan pada umumnya, ia tidak hanya mendidik perempuan untuk pandai membaca dan berhitung, tetapi juga untuk ranah politik dan berani bersuara.

Pada tahun 1931, terjadi sebuah peristiwa penting yang semakin memperkuat posisi Rasuna Said sebagai pemimpin gerakan perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Pada tahun 1931, Rasuna Said pindah ke Kota Padang. Di sana ia membuat divisi perempuan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang terfokus pada membuka sekolah sastra untuk perempuan di seluruh Sumatra Barat.¹⁰⁷ Kepindahan ini bukan keputusan yang mudah. Rasuna Said yang juga salah seorang guru di diniyah putri, terpaksa mengundurkan diri dari diniyah putri dan pindah ke Padang. Kepindahan ini disebabkan karena perguruan diniyah putri mengambil jalan tidak melibatkan diri dalam politik. Rasuna Said memilih meninggalkan posisi yang nyaman sebagai guru demi tetap bisa berjuang dalam jalur politik yang ia yakini.

Kota Padang ketika saat itu dijadikan sebagai pusat kegiatan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang merupakan hari penting pada konferensi ke-II PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang berlangsung pada 9–10 Maret tahun 1931. Hasil dari Konferensi II adalah hak otonom diberikan kepada

¹⁰⁵ Burhanudin Daya, *op. cit*, hlm.45.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.57.

¹⁰⁷ Audrey Kahin, *op. cit*, hlm.78.

perempuan yang bergerak di PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Mereka diresmikan dengan nama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) Puteri yang diketuai Rasuna Said, Ratna Sari selaku wakil ketua, sedangkan Rasimah Ismail ditunjuk untuk memimpin PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) Puteri di gemeente Padang.¹⁰⁸ Pembentukan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) Puteri ini merupakan peristiwa sejarah yang sangat signifikan. Untuk pertama kalinya, perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) memiliki peran dalam organisasi yang tidak lagi sekadar menjadi anggota pelengkap, tetapi memiliki struktur kepemimpinan tersendiri dengan kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Rasuna Said sebagai ketua PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) Puteri kini berada di posisi yang secara sistematis menggerakkan kaum perempuan Minangkabau menuju kesadaran politik dan emansipasi yang lebih nyata.

Memasuki tahun 1932, kiprah Rasuna Said semakin meluas dan semakin berani. Pada tahun 1932, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) pun menyatakan diri sebagai partai politik. Organisasi yang bersifat non kooperatif ini pun juga mengubah kepanjangan nama organisasinya menjadi Partai Muslimin Indonesia. Dalam transformasi kelembagaan ini, Rasuna Said menjadi salah seorang pengurus besar PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Posisi ini menempatkannya bukan hanya sebagai tokoh perempuan dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), tetapi sebagai pemimpin inti organisasi secara keseluruhan.¹⁰⁹

Sebagai pengurus besar, Rasuna Said memimpin perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Kolonial yang mengancam gerakan pendidikan Islam yang sedang dibangun PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Pada tahun 1932, Rasuna Said lantang menentang kebijakan Belanda dalam mengontrol lembaga pendidikan swasta lewat ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Kedua ordonansi ini dirancang Belanda untuk memperketat pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak di bawah kendali pemerintah Kolonial dan sekolah-sekolah perempuan yang Rasuna Said perjuangkan termasuk di dalamnya.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Medan Ra'jat*, Desember, 1932.

¹⁰⁹ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm.82.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.92.

Perlawanan Rasuna Said tidak dilakukan secara tertutup, melainkan langsung di hadapan publik. Dalam salah satu pidatonya yang menggemparkan dalam sebuah rapat umum untuk menentang ordonansi sekolah liar (*wilde scholen ordonantie*) yang diselenggarakan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said secara terbuka menuntut kemerdekaan Indonesia dengan berkata:

"Pintu kemerdekaan telah terbuka, dan kami harap apabila anda kembali ke tempat masing-masing, saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu; membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia Merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing.¹¹¹

Kutipan pidato ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks emansipasi perempuan. Rasuna Said tidak memisahkan perjuangan hak perempuan dari perjuangan kemerdekaan bangsa, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perempuan yang bebas hanya mungkin ada di bangsa yang merdeka, dan bangsa yang merdeka hanya mungkin terwujud jika perempuannya juga bangkit dan berjuang.

Aktivitas berpidato di muka umum tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan menyuarakan gagasan Rasuna Said, tetapi juga mencerminkan keberaniannya sebagai seorang perempuan untuk tampil di ruang publik yang pada masa itu masih didominasi oleh kaum laki-laki.¹¹² Sebagai kader perempuan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said memiliki perhatian besar terhadap upaya peningkatan peran dan posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Keterlibatan Rasuna Said dalam PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) tidak hanya terbatas pada aktivitas organisasi, melainkan mencakup upaya yang lebih luas dalam membangun kesadaran politik, memperjuangkan pendidikan, dan mendorong emansipasi perempuan. Peran tersebut menunjukkan bahwa Rasuna Said merupakan sosok perempuan yang mampu memadukan perjuangan keagamaan, kebangsaan, dan pendidikan secara berbarengan dalam kerangka perjuangan kemerdekaan Indonesia.

¹¹¹ *Medan Ra'jat, op. cit.*, 15 Maret 1931, No. 4, hlm.18.

¹¹² Hasnawati, *op. cit.*, hlm.105.

Besarnya minat masyarakat untuk menghadiri pidato Rasuna Said menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang disampaikan mendapat respon luas dari rakyat. Situasi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran dari pihak pemerintah Hindia Belanda yang memandang aktivitas PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan Kolonial. Dengan terjadinya hal tersebut, hampir seluruh kegiatan organisasi berada di bawah pengawasan aparat intelijen Kolonial, yaitu *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID). Pengawasan tersebut dilakukan secara sistematis sebagai upaya pemerintah Kolonial untuk mengendalikan perkembangan organisasi dan membatasi penyebaran pengaruh politik di tengah masyarakat.¹¹³

Pidato-pidato yang disampaikan oleh Rasuna Said dalam berbagai kegiatan pergerakan dikenal memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat. Setiap penampilannya di hadapan khalayak selalu berhasil menghimpun perhatian publik, tidak hanya karena isi pidatonya, tetapi juga karena keberanian serta ketegasan sikap yang ditunjukkannya. Rasuna Said mampu menyampaikan gagasan-gagasan politik secara tajam, sehingga pidatonya tidak jarang menggugah kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang mereka hadapi.

Keberanian Rasuna Said dalam berpidato tetap konsisten meskipun ia berada di bawah pengawasan aparat Kolonial. Kehadiran wakil *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) dalam setiap kegiatan organisasi tidak membuatnya gentar atau menahan diri dalam menyampaikan kritik, justru dalam situasi tersebut Rasuna Said semakin menunjukkan keteguhan pendiriannya dengan tetap menyuarakan pandangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia kerap menggunakan ungkapan sindiran dan perumpamaan untuk menggambarkan praktik kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial, sehingga kritik yang disampaikannya dapat diterima oleh masyarakat¹¹⁴

Aparat PID menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap jalannya kegiatan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Wakil PID yang hadir dalam setiap pertemuan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan apabila isi

¹¹³ Effendi, *op. cit*, hlm.60-61.

¹¹⁴ Putra Purwanto, *op. cit*, hlm.183.

pidato atau jalannya acara dinilai melampaui batas yang ditetapkan oleh pemerintah Kolonial. Bahkan tidak jarang aparat tersebut secara langsung menghentikan kegiatan apabila dianggap mengandung unsur yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.¹¹⁵ Tindakan ini menunjukkan adanya upaya representatif dari pemerintah Kolonial untuk membatasi ruang gerak politik tokoh-tokoh pergerakan.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketegangan antara semangat perjuangan kaum pergerakan dengan kebijakan pemerintahan Kolonial. Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, Rasuna Said tetap tampil sebagai tokoh yang berani dan konsisten dalam menyampaikan kritik sosial politik. Sikapnya tidak hanya mencerminkan keberanian pribadi, tetapi juga menunjukkan peran pentingnya dalam membangun kesadaran politik masyarakat, sekaligus menegaskan posisi perempuan dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan Kolonial.

Kemampuan Rasuna Said dalam berpidato dikenal luas oleh berbagai kalangan. Ia memiliki gaya orasi yang tegas, penuh keyakinan, dan penuh dengan semangat perjuangan, sehingga pidato-pidatonya kerap memberikan pengaruh kuat bagi para pendengarnya. Ketajaman gaya pidatonya yang dipadukan dengan keberanian dalam mengkritik ketidakadilan menjadikannya sosok yang disegani dalam berbagai forum. Atas keberaniannya tersebut, Rasuna Said memperoleh pengakuan istimewa dengan julukan “Singa Betina”. Julukan ini mencerminkan karakter keberanian, keteguhan, serta daya juang yang dimilikinya, sekaligus menegaskan posisinya sebagai satu-satunya perempuan yang memiliki wibawa besar di tengah dominasi tokoh laki-laki dalam dunia pergerakan. Sebutan tersebut merepresentasikan peran penting Rasuna Said dalam membuka ruang partisipasi perempuan dalam bidang politik dan perjuangan nasional.¹¹⁶

Dalam rapat PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang diselenggarakan di Padang Panjang pada 23 Oktober 1932, Rasuna Said tampil sebagai salah satu tokoh utama yang menyampaikan pidato bertajuk “Langkah-langkah Menuju Kemerdekaan Rakyat Indonesia”. Pidato tersebut tidak hanya berfungsi sebagai

¹¹⁵ Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm.127.

¹¹⁶ Jajat Burhanudin, *op. cit.*, hlm.163.

seruan politik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat yang hadir. Rasuna Said memanfaatkan forum tersebut untuk mengajak masyarakat memahami posisi bangsa Indonesia dalam konteks penjajahan serta pentingnya kesadaran bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan.¹¹⁷

Dalam uraian pidatonya, Rasuna Said terlebih dahulu menyinggung perjalanan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ia menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia tumbuh dari kesadaran akan ketidakadilan Kolonial menuju gerakan yang lebih terorganisasi. Menurutny, pergerakan nasional bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari peristiwa panjang rakyat yang hidup di bawah tekanan kekuasaan Kolonial.¹¹⁸ Dengan menampilkan sejarah tersebut, Rasuna Said berupaya menanamkan pemahaman bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang konsisten.

Rasuna Said mengemukakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda. Ia berpendapat bahwa berbagai peraturan yang diterapkan oleh penguasa Kolonial tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat pribumi. Kebijakan tersebut justru mempersempit ruang gerak masyarakat serta menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin dalam.¹¹⁹ Akibatnya rakyat tidak hanya mengalami kemiskinan secara material, tetapi juga kehilangan bentuk kemandirian dalam menentukan arah hidupnya sendiri.

Pada bagian akhir pidatonya, Rasuna Said menyampaikan pernyataan yang mencerminkan keteguhan sikap dan kedalaman komitmennya terhadap perjuangan bangsa. Ia menyatakan bahwa pengabdian kepada tanah air merupakan kewajiban yang harus dijalankan tanpa keraguan. Ia mengibaratkan bahwa lebih baik menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak Tuhan daripada menjalani kehidupan tanpa memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa.¹²⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa perjuangan yang ia lakukan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh keyakinan dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rakyat Indonesia. Pidato Rasuna Said dalam rapat tersebut

¹¹⁷ Astuti Widi, *op. cit*, hlm.102.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.104.

¹¹⁹ Aqib Suminto, *op. cit*, hlm.117.

¹²⁰ Burhanudin Daya, *op.cit*, hlm.93.

dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Melalui pidatonya ia tidak hanya mengkritik kebijakan penjajah, tetapi juga berupaya membangun kesadaran rakyat akan pentingnya persatuan, keberanian, dan pengorbanan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kongres Perempuan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 21 November 1932 merupakan salah satu agenda penting dalam dinamika organisasi pergerakan di Sumatra Barat. Pada tanggal 19 November 1932, diadakan rapat umum di daerah Pajakumbuh, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pengurus PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Pelaksanaan kongres ini menunjukkan besarnya perhatian organisasi terhadap penguatan peran perempuan dalam struktur dan aktivitas pergerakan, terutama dalam menghadapi situasi sosial dan politik yang semakin menekan pada masa Kolonial.¹²¹

Dalam forum tersebut, Rasuna Said menempati posisi yang strategis karena menjabat sebagai kepala departemen perempuan. Kedudukan tersebut memberinya tanggung jawab penting untuk menyampaikan serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar organisasi kepada para peserta kongres. Penjelasan yang disampaikan Rasuna Said tidak hanya berkaitan dengan garis besar ideologi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), tetapi juga menyangkut tujuan perjuangan, sikap politik, serta peran yang diharapkan dapat dijalankan oleh kaum perempuan dalam mendukung pergerakan nasional.

Rasuna Said membuka pertemuan dengan menyampaikan sapaan kepada para peserta, terutama kepada kaum perempuan yang hadir. Dalam sambutannya tersebut, ia menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang berada dalam forum itu merupakan bagian dari masyarakat yang masih hidup dalam keadaan belum merdeka. Walaupun begitu, Rasuna Said dengan menegaskan keyakinannya bahwa kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya, karena pada suatu masa yang akan datang kemerdekaan pasti akan dapat diwujudkan.¹²² Ungkapan tersebut secara spontan mendapatkan sambutan berupa tepuk tangan yang meriah dari para

¹²¹ *De Sumatra Post*, Desember 1932, hlm.15.

¹²² *Ibid*, hlm.28.

perempuan anggota PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang menunjukkan adanya ketertarikan kuat antara gagasan Rasuna Said dengan perasaan serta harapan bagi para audiensnya.

Pernyataan Rasuna Said tersebut mengandung makna yang lebih luas apabila dikaitkan dengan situasi sosial dan politik pada masa Kolonial. Istilah “belum merdeka” tidak hanya sebagai pengungkapan kondisi bangsa Indonesia yang masih berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial, tetapi juga mencerminkan posisi perempuan yang pada masa itu masih mengalami berbagai bentuk pembatasan. Perempuan belum sepenuhnya memiliki ruang yang setara dalam bidang pendidikan, politik, maupun pengambilan keputusan di ranah publik. Dengan menyadari kondisi tersebut, Rasuna Said menempatkan perempuan sebagai subjek penting dalam perjuangan kemerdekaan, bukan sekadar sebagai pelengkap atau pendukung. Pidato awal Rasuna Said tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik yang lebih luas dalam membangun kesadaran perempuan di lingkungan organisasi. Pidato ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuka pertemuan, melainkan juga sebagai sarana pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai perjuangan, dan keyakinan akan masa depan yang merdeka.

Setelah menyampaikan salam pembuka kepada seluruh peserta kongres, Rasuna Said kemudian mengarahkan perhatiannya pada pemaparan pokok-pokok pemikiran serta prinsip dasar yang menjadi landasan gerakan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Penjelasan tersebut disampaikan secara sistematis untuk menegaskan arah perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kaum perempuan. Rasuna Said meningkatkan tekanan dalam penyampaian dengan suara yang lebih lantang dan penuh penegasan. Ia mengajak para peserta untuk tidak ragu menempatkan diri sebagai bagian dari organisasi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang berkomitmen pada perjuangan rakyat. Pada saat yang sama, ia menyampaikan sikap kritisnya terhadap kehadiran pihak penguasa, yang menurut pandangannya belum tentu memiliki niat tulus untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.¹²³

¹²³ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm.151.

Ungkapan tersebut mencerminkan keberanian Rasuna Said dalam menyuarakan kritik secara terbuka di ruang publik. Sikap tegas dan pandangan kritis yang ia sampaikan mendapat respon positif dari peserta kongres, yang ditunjukkan melalui sambutan meriah berupa tepuk tangan yang bergemuruh, menandakan adanya dukungan serta kesepahaman terhadap gagasan yang disampaikannya.

Dalam suasana pidato yang berlangsung dengan penuh semangat, Rasuna Said beberapa kali harus menghadapi interupsi dari pihak PID yang berusaha menghentikan jalannya pembicaraan. Interupsi tersebut muncul di tengah-tengah penyampaian gagasan yang ia sampaikan secara lantang dan tegas, seolah menjadi bentuk perlawanan terhadap kritik-kritik tajam yang diarahkan kepada kekuasaan dan sistem politik yang berlaku saat itu. Meskipun demikian, Rasuna Said menunjukkan keteguhan sikap dan keberaniannya. Ia tidak terpancing oleh gangguan tersebut, tidak pula memberi ruang untuk melemahkan pidatonya.¹²⁴ Sikap ini mencerminkan konsistensinya sebagai seorang orator dan pejuang yang teguh pada prinsip, sekaligus menunjukkan bahwa tekanan dari pihak tertentu tidak mampu meredam suara perjuangan yang ia sampaikan. Dalam pidato yang sama, Rasuna Said menegaskan dengan jelas posisi dan prinsip PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) sebagai sebuah organisasi politik. Ia menyatakan bahwa PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) tidak berada di bawah pengaruh atau kendali partai politik lain mana pun.¹²⁵ Penegasan ini menjadi penting, mengingat pada masa itu kerap muncul kecurigaan bahwa organisasi-organisasi pergerakan tertentu hanyalah kekuatan politik lain yang lebih dominan. Dengan menekankan sifat PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia), Rasuna Said ingin menunjukkan bahwa arah perjuangan organisasi tersebut ditentukan secara mandiri, berdasarkan kepentingan bangsa dan rakyat, bukan atas dasar tekanan atau kepentingan kelompok tertentu.

Rasuna Said kerap berhadapan dengan tekanan dari aparat Kolonial, baik berupa teguran lisan, peringatan resmi, maupun perintah langsung agar menghentikan orasinya di hadapan khalayak. Momentum tersebut dimanfaatkan

¹²⁴ Farchan Bulkin, *op. cit.*, hlm.129.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.131.

Rasuna Said untuk menyuarakan kritik yang tajam dan terbuka terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Melalui pidatonya, ia mengungkapkan pandangan bahwa praktik kolonialisme tidak sekadar menguasai wilayah, tetapi juga secara sistematis berupaya merendahkan martabat bangsa Indonesia. Menurut Rasuna Said, pemerintah Kolonial sengaja menciptakan kondisi yang membuat rakyat tetap berada dalam kebodohan dan kemiskinan agar mudah dikendalikan. Lebih jauh, ia menilai bahwa sistem penjajahan telah menanamkan mentalitas perbudakan yang berdampak pada munculnya penderitaan berkepanjangan, sikap enggan untuk melawan ketidakadilan, serta melemahnya rasa tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Keberanian Rasuna Said dalam mengemukakan pandangan tersebut dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan Kolonial. Oleh karena itu, tidak lama setelah pidato itu disampaikan, ia dijemput oleh sejumlah oknum aparat dengan tuduhan melakukan penghasutan dan intimidasi terhadap rakyat, sebuah langkah yang mencerminkan ketakutan pemerintah Kolonial terhadap pengaruh gagasan-gagasannya.¹²⁶

Pada 27 Desember 1932 terjadi peristiwa penangkapan terhadap Rasuna Said, ini menjadi salah satu bentuk nyata represi pemerintah Kolonial terhadap tokoh pergerakan yang berani menyuarakan kritik secara terbuka. Ia diamankan oleh aparat kepolisian di Bukittinggi dan kemudian dipindahkan ke Pajakumbuh untuk menjalani penahanan sementara. Dalam proses tersebut, Rasuna Said dituduh telah melakukan tindakan yang dianggap membahayakan ketertiban umum, terutama karena pidato-pidatonya dinilai mampu membangkitkan kesadaran politik rakyat. Pemerintah Kolonial menuduhnya menghasut dan memengaruhi masyarakat agar bersikap melawan, sekaligus menanamkan rasa kebencian terhadap kekuasaan Belanda. Tuduhan ini kemudian diperkuat dengan penerapan Pasal 153 dalam *Wetboek van Strafrecht*, yaitu aturan yang membatasi kebebasan berbicara di muka umum dan dikenal luas dengan istilah *sprekdelict*. Melalui pasal tersebut, setiap ungkapan yang dianggap mengganggu kewibawaan pemerintah Kolonial dapat dijadikan dasar hukum untuk penindakan.¹²⁷ Kasus Rasuna Said menunjukkan

¹²⁶ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm.158.

¹²⁷ *De Locomotief*, Januari 1933, hlm.4.

bagaimana hukum Kolonial digunakan sebagai alat politik untuk membungkam suara kritis, khususnya dari kalangan pergerakan nasional dan perempuan yang mulai aktif dalam ranah politik.

Kasus *sprekdelict* yang menjerat Rasuna Said kemudian diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Negeri Hindia Belanda di Pajakumbuh pada 28 Desember 1932. Dalam persidangan tersebut, Rasuna Said memperoleh pendampingan hukum dari S.A. Hakim selaku penasihat hukumnya. Proses pengadilan ini menarik perhatian luas dari masyarakat, khususnya mereka yang merasa simpati terhadap perjuangan dan keberanian Rasuna Said dalam menyuarakan pendapat. Antusiasme publik terlihat dari membludaknya jumlah pengunjung yang datang untuk menyaksikan jalannya sidang, sehingga gedung pengadilan dipenuhi oleh massa, baik di dalam ruang sidang maupun di area luar gedung. Para pengunjung tidak hanya berasal dari lingkungan perkotaan, tetapi juga datang dari berbagai daerah, termasuk kalangan santri dan tokoh-tokoh pesantren di pedesaan yang merasa memiliki kedekatan ideologis dengan pemikiran Rasuna Said. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan moral sekaligus solidaritas terhadap Rasuna Said yang dianggap berani menantang ketidakadilan Kolonial.

Suasana persidangan berlangsung dalam kondisi yang tegang dan penuh perhatian, terutama ketika Rasuna Said memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan sikap yang tenang namun tegas, ia menyampaikan jawabannya secara jelas dan konsisten, tanpa menunjukkan rasa takut atau keraguan, sehingga semakin menegaskan keteguhan pendiriannya serta memperlihatkan karakter perlawanan intelektual terhadap kekuasaan Kolonial.¹²⁸

Rasuna Said selanjutnya diminta untuk memberikan penjelasan secara rinci atas berbagai pernyataan yang telah ia sampaikan dalam pidatonya. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan aparat Kolonial adalah ungkapan yang menyebutkan “selamat datang kepada anak laki-laki dan perempuan yang belum bebas, tetapi akan bebas, dan pemerintah Belanda akan lenyap.” Pertanyaan ini diajukan karena dianggap mengandung makna politis yang kuat serta berpotensi

¹²⁸ Jajat Burhanudin, *op. cit.*, hlm.182.

menghasut rakyat untuk menentang kekuasaan Kolonial. Menanggapi hal tersebut, Rasuna Said menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah sebuah ajakan untuk memberontak, melainkan gambaran mengenai kondisi nyata bangsa Indonesia pada masa itu. Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia memang masih hidup dalam keadaan terjajah dan belum menikmati kemerdekaan secara penuh. Namun demikian, ia meyakini bahwa keadaan tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Menurut Rasuna Said, kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa, dan dalam sejarah dunia telah terbukti bahwa bangsa-bangsa yang memiliki kesadaran akan haknya pada akhirnya mampu mencapai kebebasan. Oleh karena itu, ia menyampaikan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia pun akan melalui proses yang sama, yakni bergerak menuju kemerdekaan melalui kesadaran, perjuangan, dan keteguhan sikap.¹²⁹ Dalam kerangka pemikiran tersebut, Rasuna Said memandang kekuasaan pemerintah Belanda sebagai sesuatu yang tidak abadi. Ia percaya bahwa apabila rakyat terus menyadari hak-haknya dan berjuang secara konsisten, maka kekuasaan Kolonial yang sedang berjalan saat itu akan kehilangan legitimasi dan pada akhirnya runtuh dengan sendiri. Jajang Jahroni menyatakan bahwa:

Berakhirnya proses persidangan membawa konsekuensi berat bagi Rasuna Said, yakni dijatuhkannya hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Kolonial menganggap Rasuna Said bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, sehingga ia harus menjalani masa tahanan di Penjara Bulu yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 9 Juni 1933, Rasuna Said diberangkatkan dari Pelabuhan *Emma Haven*, yang pada masa kini dikenal sebagai Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, menuju tempat penahanannya. Perjalanan tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal uap *SS van Linskhoten*. Keberangkatan ini bukan sekadar pemindahan seorang tahanan, melainkan menjadi peristiwa yang sarat dengan makna emosional dan simbolis bagi masyarakat setempat.¹³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasuna Said dijatuhi pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dan ditempatkan di Penjara Bulu, Semarang. Proses keberangkatannya pada 9 Juni 1933 berlangsung dalam suasana emosional, ketika masyarakat setempat memberikan penghormatan terakhir sebelum ia

¹²⁹ Jajat Burhanudin, *op. cit*, hlm.184.

¹³⁰ Jajang Jahroni, *op. cit*, hlm.154.

menjalani hukuman. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai bentuk solidaritas, disertai rasa haru dan tangisan yang tidak terbendung. Peristiwa ini mencerminkan besarnya dukungan moral serta penghargaan masyarakat terhadap perjuangan dan keberanian Rasuna Said dalam menentang kekuasaan Kolonial.

Selama menjalani masa pemenjaraan, Rasuna Said tetap mempertahankan sikap kritis dan semangat juangnya tanpa mengalami kemunduran berarti. Keadaan terisolasi dan keterbatasan kebebasan tidak membuatnya berhenti memikirkan nasib perempuan pribumi maupun masa depan bangsanya yang masih berada di bawah kekuasaan Kolonial. Justru dalam situasi tersebut, Rasuna Said semakin menunjukkan keteguhan prinsip dan kedewasaan berpikir sebagai seorang tokoh pergerakan. Walaupun secara fisik terpisah dari kehidupan sosial dan aktivitas organisasi, ia tetap berupaya menjaga kesinambungan perjuangan dengan menjalin komunikasi bersama rekan-rekannya di luar penjara. Melalui surat-surat dan tulisan-tulisan yang disusunnya, Rasuna Said menyampaikan gagasan, semangat perlawanan, serta pandangan politik yang sarat dengan kesadaran nasional. Tulisan-tulisan tersebut menjadi bukti bahwa pemenjaraan tidak mampu membungkam pemikiran dan komitmennya terhadap perjuangan emansipasi perempuan dan kemerdekaan Indonesia. Selama di dalam penjara, ia membaca dan menulis secara aktif, mengikuti perkembangan pergerakan nasional, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Seperti termuat:

Kabar tentang penangkapan Rasuna Said tidak hanya berhenti di Sumatra, tetapi juga sampai ke kalangan pergerakan di Pulau Jawa. Peristiwa tersebut memunculkan rasa prihatin sekaligus kekaguman dari sejumlah tokoh pergerakan yang menilai keberanian Rasuna Said sebagai wujud keteguhan sikap dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, khususnya kaum perempuan. Bentuk dukungan pun mengalir kepada Permi melalui berbagai surat dan telegram yang dikirimkan oleh beberapa organisasi dan partai politik. Di luar dukungan kelembagaan tersebut, Dr. Sutomo secara pribadi mengungkapkan pandangannya bahwa Rasuna Said merupakan figur inspiratif yang patut dijadikan panutan bagi para pemimpin dan pejuang Indonesia.¹³¹

Penangkapan Rasuna Said tidak hanya menimbulkan reaksi di wilayah Sumatra Barat, tetapi juga memicu gelombang solidaritas dari tokoh-tokoh

¹³¹ *De Sumatra Post*, 10 Februari 1933, No.34.

pergerakan nasional yang berada di Pulau Jawa. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kasus yang menimpa Rasuna Said dipandang sebagai persoalan politik nasional, bukan semata-mata masalah lokal. Berbagai surat dan telegram dikirimkan oleh tokoh serta organisasi politik sebagai bentuk simpati dan pembelaan terhadap Rasuna Said yang dinilai berani menyuarakan kepentingan rakyat di bawah tekanan pemerintahan Kolonial. Sikap solidaritas ini mencerminkan kuatnya jaringan komunikasi antar aktivis pergerakan serta kesadaran bersama akan pentingnya kebebasan berpendapat dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

Hal tersebut sejalan dengan teori kepemimpinan kharismatik yang menekankan bahwa pengaruh seorang pemimpin tidak semata-mata bersumber dari lembaga tertentu yang bersifat struktural, tetapi juga dari kualitas personal yang mampu menumbuhkan kepercayaan dan kekaguman.¹³² Pembahasan mengenai meluasnya kabar penangkapan Rasuna Said hingga ke Pulau Jawa menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak lagi dipahami sebagai persoalan yang bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi isu yang memperoleh perhatian luas dari kalangan pergerakan nasional. Dalam konteks ini, tindakan Rasuna Said yang secara terbuka menentang kebijakan Kolonial hingga berujung pada penangkapan, justru memperkuat legitimasi moralnya sebagai figur perjuangan yang memiliki daya tarik kharismatik.

Salah satu tokoh yang secara terbuka menyatakan dukungannya adalah Dr. Sutomo. Dalam pandangannya, Rasuna Said diposisikan sebagai figur inspiratif yang layak dijadikan teladan bagi para pemimpin dan pejuang bangsa. Pernyataan tersebut tidak hanya menguatkan posisi Rasuna Said secara moral, tetapi juga mempertegas peran penting perempuan dalam gerakan nasional. Dukungan dari tokoh Dr. Sutomo memberikan legitimasi politik bahwa tindakan Rasuna Said bukanlah provokasi semata, melainkan bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan Kolonial.¹³³

¹³² Rustam E. Tamburaka, *op. cit.*, hlm.103.

¹³³ Muhammad Sabarudin, *op. cit.*, hlm.76.

Kasus *spreekdelict* yang menjerat Rasuna Said juga mendapat perhatian luas dari media massa pada masa itu. Pemberitaan di surat kabar menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi sekaligus membentuk opini publik mengenai tindakan represif pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar lokal di berbagai daerah mulai memuat laporan terkait penangkapan tersebut, menandakan bahwa peristiwa ini memiliki daya tarik dan signifikansi yang besar di mata masyarakat. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai ruang diskusi politik yang memperlihatkan ketegangan antara penguasa Kolonial dan kaum pergerakan.

Salah satu surat kabar yang turut memberitakan kasus ini adalah *Fikiran Ra'jat* yang terbit di Bandung. Dalam edisi nomor 24 tanggal 9 Desember 1932, surat kabar tersebut melaporkan adanya rapat umum PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) di Padang yang berujung pada penangkapan Rasuna Said. Surat kabar tersebut menyebutkan:

Rasuna Said, seorang perempuan yang aktif berpidato dalam rapat tersebut, dituduh melakukan *spreekdelict* dan kemudian dikenai penahanan preventif oleh pemerintah Kolonial. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa aktivitas politik perempuan telah menjadi perhatian serius, bahkan dianggap berbahaya oleh penguasa Kolonial. Pasca penangkapan Rasuna Said, aparat Kolonial semakin memperluas tindakan represifnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berdampak pada dunia pendidikan. Dua orang pengajar dari Sumatra Thawalib, Zainal Abidin Ahmad dan Duski Samad, tidak diperkenankan lagi untuk meneruskan tugas mereka sebagai guru.¹³⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penangkapan Rasuna Said tidak berdiri sebagai peristiwa yang terpisah, melainkan menjadi awal dari tindakan represif yang lebih luas terhadap para aktivis pergerakan. Sejumlah aktivis perempuan, seperti Rasimah Ismail, Ratna Sari, dan Fatimah, turut ditangkap dengan tuduhan *spreekdelict*, menyusul penahanan Rasuna Said. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian Rasuna Said dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah Kolonial telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi orang-orang di sekitarnya. Sikap tegas dan konsisten tersebut tidak hanya menguatkan posisi Rasuna Said sebagai tokoh pergerakan, tetapi juga mendorong aktivis lain untuk tetap bersuara meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan Kolonial.

¹³⁴ *Fikiran Ra'jat*, 9 Desember 1932, No.24, hlm.4.

Dampak dari situasi ini tidak berhenti pada penangkapan para aktivis perempuan saja. Reaksi pemerintah Kolonial juga menyasar kalangan pendidik yang dianggap memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran politik di tengah masyarakat. Zainal Abidin Ahmad dan Duski Samad, yang dikenal sebagai guru di lingkungan Sumatra Thawalib, dikenai sanksi berupa larangan mengajar. Tindakan tersebut mencerminkan upaya sistematis pemerintah Kolonial untuk membatasi ruang gerak intelektual dan memutus mata rantai penyebaran gagasan perlawanan. Dengan demikian, rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa keberanian satu tokoh dapat memicu dampak luas, baik dalam bentuk solidaritas sesama aktivis maupun tindakan penindasan yang semakin keras dari pihak penguasa Kolonial.

Selama Rasuna Said menjalani hukuman, kondisi PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) di luar semakin berat. gerakan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) semakin terbatas setelah para pemimpinnya, seperti Muchtar Luthfi, Jalaluddin Thaib, dan Ilyas Yakub, ditangkap dan diadili pada tahun 1933, kemudian diasingkan ke Digul, Irian pada tahun 1934. Situasi ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi Rasuna Said begitu ia bebas dari penjara.¹³⁵

Penahanan Rasuna Said di Bulu, Semarang, menjadi salah satu momentum penting yang menunjukkan semakin kerasnya sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap aktivitas politik kaum pergerakan, khususnya PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Selama periode tersebut, hampir seluruh kegiatan organisasi berada dalam pengawasan ketat aparat Kolonial. Ruang gerak PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) tidak hanya dibatasi secara administratif, tetapi juga ditekan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan melemahkan pengaruhnya di tengah masyarakat. Setiap aktivitas yang berpotensi membangkitkan kesadaran politik rakyat dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan Belanda.¹³⁶

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Kolonial memanfaatkan hak luar biasa yang memberikan kewenangan besar kepada penguasa untuk bertindak tanpa melalui proses hukum yang adil. Dengan dasar inilah pengawasan

¹³⁵ Astuti Widi, *op. cit*, hlm.147.

¹³⁶ Effendi, *op. cit*, hlm.107.

diperketat, pembatasan diberlakukan, dan tindakan penindasan dilegitimasi atas keamanan dan ketertiban. Kebijakan ini mencerminkan ketakutan Belanda terhadap berkembangnya kesadaran politik rakyat serta meningkatnya pengaruh tokoh-tokoh pergerakan di berbagai daerah.

Ketika Rasuna Said akhirnya bebas pada tahun 1934, ia mendapati situasi yang jauh berbeda dari saat ia dipenjara dua tahun sebelumnya. Begitu bebas, Rasuna Said kembali ke Sumatra Barat dan menetap di Padang. Ia ingin melanjutkan perjuangannya di bidang politik bersama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Namun, gerakan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) semakin terbatas setelah para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. Menghadapi kenyataan pahit ini, Rasuna Said tidak menyerah. Ia mengubah strategi perjuangannya dari arena politik terbuka ke jalur yang lebih dapat diterima oleh penguasa Kolonial.¹³⁷

Pada tahun 1935, Rasuna Said dipercaya memimpin majalah sekolah yang bernama *Raya*. Kepemimpinan Rasuna Said atas majalah ini menjadi lebih formal dan lebih berpengaruh. Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatra Barat. Melalui majalah *Raya*, Rasuna Said membuktikan bahwa tulisan bisa sama tajamnya bahkan lebih berbahaya dalam pandangan Kolonial daripada pidato di hadapan massa. Tulisan bisa disebar, dibaca berulang kali, dan menjangkau pembaca yang jauh lebih luas daripada mereka yang hadir dalam sebuah rapat. Namun, pemerintah Kolonial tidak tinggal diam. PID Belanda mempersempit ruang gerak Rasuna Said dan rekan-rekannya.

Pada tahun 1937, PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) pun dipaksa Belanda menjadi partai yang tidak berarti lagi atau bubar dari kegiatan politik. Pembubaran paksa PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) ini menjadi pukulan berat bagi Rasuna Said sebagai organisasi yang ia ikut dirikan dan perjuangkan selama bertahun-tahun kini tidak lagi bisa bergerak secara bebas. Keputusan Rasuna Said untuk pindah ke Medan pada tahun 1937 bukan sekadar perpindahan dari tekanan Kolonial di Padang, melainkan sebuah langkah strategis untuk membuka perjuangan baru di wilayah yang berbeda. Di Medan, ia kembali

¹³⁷ Jajat Burhanudin, *op. cit.*, hlm.203.

mengintegrasikan dua kekuatan utamanya yaitu pendidikan dan jurnalisme. Seperti termuat:

Setelah menjalani masa hukuman di Penjara Bulu, Semarang, Rasuna Said akhirnya kembali ke Padang dengan harapan dapat melanjutkan kehidupan dan perjuangannya. Namun, kepulangan tersebut justru menghadapkan dirinya pada kenyataan pahit yang sama sekali tidak ia bayangkan sebelumnya. Ia mendapati bahwa situasi politik telah berubah drastis dan kondisi organisasi yang ia perjuangkan berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Banyak kawan seperjuangannya, khususnya para pemimpin Permi, telah lebih dahulu ditangkap oleh pemerintah Kolonial, bahkan sebagian di antaranya harus menjalani pembuangan ke daerah-daerah terpencil. Kenyataan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi Rasuna Said, sebab perjuangan yang selama ini dibangun dengan pengorbanan besar harus menghadapi tekanan yang semakin berat. Pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan terhadap aktivitas Permi, membatasi ruang gerak anggotanya, serta menutup hampir seluruh peluang bagi partai tersebut untuk bergerak secara terbuka. Demi menghindari penindasan yang lebih keras dan demi keselamatan para anggotanya, keputusan berat pun harus diambil. Akhirnya, dengan mempertimbangkan berbagai tekanan dan keterbatasan yang ada, Permi memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitasnya. Keputusan tersebut diwujudkan dengan pembubaran resmi partai pada 18 Oktober 1937.¹³⁸

Pembubaran PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) bukan sekadar berakhirnya sebuah organisasi, melainkan cerminan dari peraturan pemerintah Kolonial dalam meredam setiap gerakan yang dianggap mengancam kekuasaannya. Bagi Rasuna Said, peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa besar dalam perjalanan perjuangannya, namun sekaligus memperkuat keyakinannya bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak dapat dipadamkan hanya dengan membubarkan sebuah organisasi pergerakan.

¹³⁸ *De Sumatra Post*, 24 Desember 1937, hlm.13.